

## **FAKHRUL RAMADHAN**

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini membahas dinamika politik dalam formulasi kebijakan dan program Formulasi Kebijakan Tata Ruang Rencana Trace Kali Ciliwung : (Studi Kasus Pelaksanaan Pergub DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2012) dengan menggunakan Teori Aktor Kebijakan Publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan institusi perlu melibatkan berbagai stakeholder untuk menentukan kepentingan kolektif. Keterlibatan berbagai aktor dalam formulasi kebijakan Tata Ruang Rencana Trace Kali Ciliwung : (Studi Kasus Pelaksanaan Pergub DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2012) terdiri dari Pemprov DKI Jakarta, DPRD,akademisi, LSM, Stakeholders dan media massa yang dimana Pemprov DKI Jakarta sebagai lembaga pemerintahan daerah memiliki peran sentral sebagai fasilitator, koordinator berdasarkan kewenangan dan kemampuan mengelola, melaksanakan program-program untuk pengembangan Ruang Rencana Trace Kali Ciliwung : (Studi Kasus Pelaksanaan Pergub DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2012) yang diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah, dijabarkan Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (untuk selanjutnya disebut sebagai Perpres No. 71/2012),, dalam pengembangan Pada stratifikasi wilayah sekitar sungai, terdapat 28 persen rumah tangga yang menolak adanya normalisasi Kali Ciliwung. Sedangkan pada stratifikasi bukan sekitar sungai atau wilayah yang tidak berbatasan langsung dengan Kali Ciliwung, persentase yang menolak adanya normalisasi sungai sebesar 22 persen.

**Kata kunci:** Aktor, relasi kuasa, formulasi kebijakan, institusional, Kebijakan Trace Kali Ciliwung No 163 Tahun 2012.

***Formulation of Spatial Planning Policy for Ciliwung River Trace:  
(Case Study on Implementation of DKI Jakarta Governor  
Regulation Number 163 of 2012)***

**FAKHRUL RAMADHAN**

***ABSTRACT***

*The purpose of this study is to discuss the political dynamics in the formulation of policies and programs. Formulation of Spatial Policy on Ciliwung River Spatial Plan: (Case Study of Implementation of DKI Jakarta Governor Regulation Number 163 of 2012) using Public Policy Actors Theory. The method used is descriptive qualitative. The final result of this study shows that institutions need to involve various stakeholders to determine common interests. Involvement of various actors in the formulation of the Ciliwung River Footprint Spatial Planning Policy: (Case Study on Implementation of DKI Jakarta Governor Regulation Number 163 of 2012) consisting of the DKI Jakarta Provincial Government, DPRD, academics, NGOs, stakeholders and mass media in which the DKI Jakarta Provincial Government as an institution local government. has a central role as a facilitator, coordinator based on the authority and ability to manage, implementing the Ciliwung River Trace Plan development program: (Case Study on Implementation of DKI Jakarta Governor Regulation Number 163 of 2012) which is manifested in the form of a local government work plan which is described on the Implementation of Land Acquisition for Development in the Public Interest (hereinafter referred to as Perpres No. 71/2012). In the area stratification around the river, there are 28 percent of households who reject the normalization of the Ciliwung River. Meanwhile, in the stratification that is not located around the river or areas that are not directly adjacent to the Ciliwung River, the percentage that rejects river normalization is 22 percent.*

Fakhrul Ramadhan, 2022

Formulasi Kebijakan Tata Ruang Rencana Trace Kali Ciliwung

Studi Kasus Pelaksanaan Pergub DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2012

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

**Keywords:** *Actors, power relations, policy formulation, institutions, Ciliwung River Management Policy No 163 of 2012*

Fakhru Ramadhan, 2022

Formulasi Kebijakan Tata Ruang Rencana Trace Kali Ciliwung

Studi Kasus Pelaksanaan Pergub DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2012

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik